

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang adalah negara yang terletak di Asia Timur dan salah satu negara maju di Asia Timur selain Cina dan Korea Selatan. Jepang dikenal sebagai negara yang perekonominya maju, meskipun setelah kebangkitan Cina, Jepang tetap menjadi negara yang memiliki perekonomian terbesar kedua setelah Cina di Asia Timur. Banyak produk barang yang dihasilkan oleh industri Jepang dan dikonsumsi oleh banyak negara di dunia (Goto-Jones, 2009).

Jepang juga adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Shinto dan Buddha, pada akhir tahun 2012 penganut agama Shinto menempati jumlah penganut terbanyak pertama, setelah itu agama Buddha menempati tempat kedua terbanyak dan yang terakhir setelah dua agama tadi adalah agama Kristen (Shindo, 2015).

Meskipun Jepang adalah negara yang minoritas Muslim, dapat dikatakan bahwa Jepang sangat serius untuk mengembangkan *halal tourism*. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh wisatawan Muslim yang berlibur dan mengunjungi Jepang, sehingga Jepang berhasil meraih penghargaan pada *World Halal Tourism Award 2016* yang diselenggarakan di Abu Dhabi, sebagai “*World Best Non OIC Emerging Halal Destination*” (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Dapat dilihat bahwa Jepang menggunakan *Soft diplomacy* sebagai instrumen penting dalam industri pariwisatanya demi menggenjot kembali perekonomiannya

setelah terjadi bencana tsunami pada tahun 2011 lalu yang sempat membuat wisatawan asing enggan untuk mengunjungi Jepang, salah satu cara Jepang dalam mengembalikan eksistensi industri pariwisatanya adalah dengan rekonstruksi infrastruktur serta perbaikan hotel-hotel dan bekerjasama dengan para pengusaha di Jepang demi menunjang pariwisatanya (Miana & Dwi Subagio, 2013).

Berkat semua upaya yang dilakukan oleh Jepang ini, memberikan peningkatan yang cukup positif terhadap industri pariwisatanya, ditambah lagi, pemerintah Jepang terus berharap bidang pariwisata dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jepang sejak dicanangkannya *Tourism Basic Act* 1963. Hingga saat ini, banyak wisatawan asing yang terus mengunjungi Jepang karena ketertarikannya dengan negeri sakura ini (Miana & Dwi Subagio, 2013).

Selain keindahan sakura, Jepang juga optimal dalam menjaga objek peninggalan, seperti peninggalan kuil-kuil ibadah, kastil dan fasilitas publik contohnya transportasi umum, dapat dilihat dari segala upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah bentuk keseriusannya dalam mengembangkan industri pariwisata (Rosliana, Wisata Budaya Sebagai Alat Penguat Ekonomi Negara di Jepang, 2017).

Pada tahun 2012 jumlah wisatawan yang datang ke Jepang sedikit meningkat daripada tahun sebelumnya, wisatawan ini juga termasuk wisatawan muslim yang berasal dari negara mayoritas muslim di Asia Tenggara yang turut menyumbang devisa negara Jepang dalam bidang pariwisatanya (Putra, 2016).

Hal ini menjadi perhatian pemerintah Jepang, mengingat Jepang adalah negara minoritas muslim, membuat para wisatawan muslim kesulitan untuk mendapatkan makanan halal, padahal jika melakukan

travelling, setidaknya wisatawan harus merasakan kuliner khas dari negara tersebut, namun ini menjadi permasalahan bagi wisatawan muslim, dikarenakan seorang muslim hanya diperbolehkan memakan makanan yang halal (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (COMCEC) menyebut halal tourism dengan istilah *Muslim Friendly Tourims* (MFT) dan mendefinisikannya sebagai:

“Muslim trevelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible”, or it also be defined as “halal conscios travelers, traveling for any purposes, which is halal (permissible)” (Wahidati & Sarinastiti, 2018)

Dalam merespon kebutuhan wisatawan muslim dalam melakukan *travelling*, pemerintah Jepang mulai antisispasi untuk membuat kebijakan dalam industri pariwisatanya agar terus dapat menarik wisatawan muslim khususnya di Asia Tenggara, strategi pemerintah Jepang dalam mengantisipasi ini adalah dengan mengembangkan *Halal Tourism* atau bisa disebut juga *Muslim Friendly* (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Halal Tourism adalah industri yang sedang berkembang di dunia, dalam hal ini, Jepang memberikan perlakuan khusus bagi para wisatawan muslim, Jepang menyediakan *Muslim friendly food*, menyediakan banyak tempat ibadah yang mudah dijangkau, misalnya di bandara, kamar kecil dengan ketersediaan air, serta penginapan atau hotel yang menyediakan menu halal dan tempat beribadah. Karena adanya kebijakan *halal tourism* ini, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pariwisata Jepang (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Ditambah lagi, Jepang membuat kebijakan bebas visa terhadap beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Thailand dan Malaysia pada tahun 2013. Berkat kebijakan bebas visa dan dikembangkannya *halal tourism* yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2013 ini, mengakibatkan jumlah wisatawan dari Malaysia naik 13 kali lebih banyak di tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2012. Sedangkan, pada tahun yang sama, wisatawan dari Indonesia naik 14 kali lebih banyak. Tahun 2013 menjadi tahun yang sangat membanggakan bagi Jepang, dikarenakan pada tahun itu wisatawan asing Jepang mencapai 10 juta untuk pertama kalinya dan 3% dari wisatawan itu adalah muslim (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

“Mengapa Jepang menerapkan *Muslim Friendly* tahun 2013-2018?”

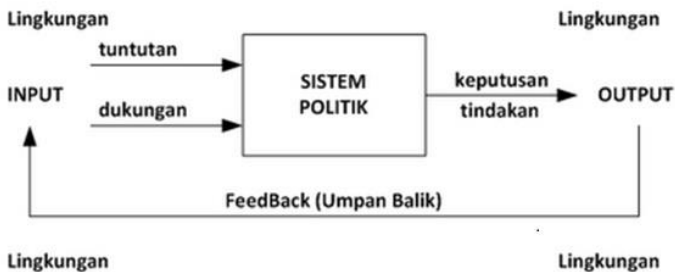
C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*)

Teori pembuatan keputusan ini ditawarkan atau dikemukakan oleh David Easton, menurut Easton, batasan sistem politik berdasarkan dari tiga komponen, yaitu *The political system allocates values, its allocations are authoritative* dan *its authoritative allocations are binding on the society as a whole*. Tiga komponen tersebut memiliki pengertian bahwa sistem politik merupakan penerapan nilai-nilai yang dimana penerapan nilai-nilai ini bersifat memaksa atau dengan kewenangan, dan penerapan nilai-nilai yang memaksa tadi akan mengikat masyarakat untuk mematuhi (Haryanto, 1982, hal. 2).

Teori yang dikemukakan Easton ini, sistem politik dan politik lingkungannya dihubungkan oleh *input-output*, sistem politik diistilahkan sebagai proses perubahan, yang berawal dari *input* akan berubah menjadi *output*, hal ini yang akan menjadi jaminan mampu atau tidaknya suatu pemerintahan untuk bertahan (Mas'oeed & MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 2008). Fungsi sistem politik adalah menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan yang berasal dari masyarakat, serta membuat kebijakan yang menerapkan suatu nilai-nilai (materi atau non-materi).

Di dalam sistem politik akan ditemukan “tuntutan” untuk menghasilkan suatu “*output*” yaitu misalnya kebijakan, dan akan ada seseorang atau suatu kelompok yang kemudian mendukung tuntutan tersebut. Tuntutan-tuntutan dari kelompok akan berlomba-lomba agar tuntutannya dapat di proses dalam sistem politik, kemudian setiap keputusan akan berinteraksi dengan lingkungan, saat kebijakan baru muncul dan berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok yang kemudian akan mendukung atau menolak dari kebijakan tersebut (*feedback*).



Gambar 1: Sistem Politik David Easton.

Sumber: (Haryani, 2015)

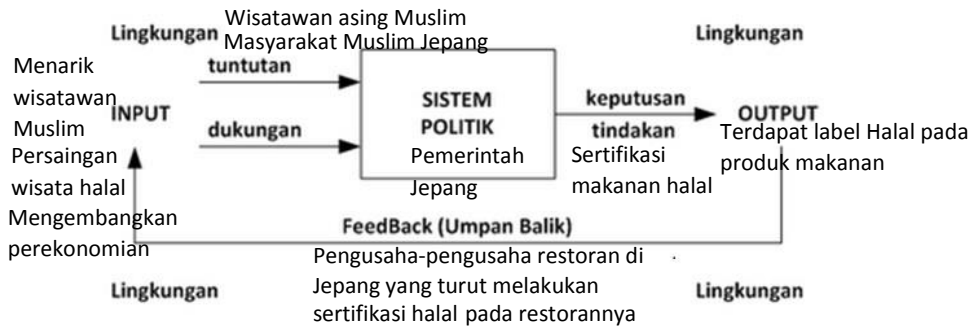
Teori pembuatan keputusan atau yang juga sering disebut dengan analisis sistem politik dapat dikatakan bekerja jika memiliki *input-output* yang jelas. Tanpa adanya *input* maka sistem itu tidak berfungsi dan tanpa *output* pekerjaan yang dilakukan oleh sistem itu tidak dapat diidentifikasi. *Input* adalah tuntutan dan dukungan, tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat atau kelompok diproses melalui perundingan-perundingan agar dapat memuaskan masyarakat dan kelompok itu sendiri. Sedangkan *output* adalah hasil akhir yang telah diproses tadi menjadi sebuah keputusan. Kemudian *output* akan menghasilkan umpan balik yang dampaknya akan di rasakan pada *input* lagi (Mas'oeed & MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, 2008).

Jika membicarakan suatu kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan, maka kemudian akan dihadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisa pekerjaan dari suatu sistem tersebut. Kehidupan politik berdiri dan dikelilingi oleh lingkungannya. Easton mengatakan bahwa lingkungan sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu *the intrasocietal environment* dan *the extrasocietal environment*.

Yang dimaksud *the intrasocietal environment* adalah yang merujuk pada bagian lingkungan sosial dan fisik yang terletak di luar batas-batas sistem politik dan tetapi di dalam masyarakat yang sama. Di dalam *the intrasocietal environment* ini adalah termasuk sistem biologi, sistem ekologi, sistem personaliti dan sistem sosial. Sedangkan *the extrasocietal environment* adalah “*may lie outside the society of which the political system itself is a social subsystem, yet it may have important consequences for the persistence or change of political system*” dan

termasuk di dalamnya sistem sosial internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem politik internasional (Haryanto, 1982).

Dalam menjelaskan aspek ini, penulis menyimpulkan bahwa Jepang mengambil keputusan untuk menerapkan *halal tourism* atau yang dapat disebut juga *muslim friendly* karena adanya faktor internal, yaitu tuntutan dari masyarakat Jepang yang memeluk agama Islam, para kelompok masyarakat Muslim di Jepang merasa prihatin terhadap kelompoknya yang merasa kesulitan untuk menemukan makanan halal (Merinda, 2018).



Gambar 2: Aplikasi teori David Easton

Sumber: (Haryani, 2015)

Karena Jepang adalah negara minoritas Muslim, menjadikan tidak banyak restoran halal di Jepang dan produk-produk Jepang juga tidak banyak yang bersertifikasi halal, biasanya masyarakat Muslim Jepang membeli produk halal hasil dari impor negara lain. Karena sulitnya mendapatkan makanan halal bagi masyarakat Muslim yang tinggal di Jepang ini, menjadikan adanya tuntutan dari masyarakat Muslim dan asosiasi yang ada di Jepang agar dapat mempengaruhi sistem politik sehingga dibentuklah

suatu organisasi nirlaba berbasis Islam agar dapat melakukan sertifikasi makanan halal.

Kemudian, selain ada tuntutan dari masyarakat internal Jepang, ada juga dukungan dari wisatawan asing Muslim yang datang dari Malaysia dan Indonesia, yang di mana ini berarti tuntutan yang datang dari lingkungan eksternal, wisatawan asing Muslim yang mengunjungi Jepang juga merasa kesulitan mendapatkan makanan halal, banyak wisatawan asing Muslim yang berharap bahwa Jepang lebih terbuka dalam memberlakukan sertifikasi makanan halal. Serta dalam menanggapi meningkatnya jumlah pengunjung Muslim dan *demand* masyarakat Muslim, Jepang kemudian melakukan sertifikasi makanan halal dan ikut melakukan survei proses sertifikasi halal negara untuk membantu memastikan bahwa makanan halal yang ditawarkan oleh restoran domestik sesuai dengan ajaran Islam. Agar dapat mempertahankan minat wisatawan asing yang datang ke Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang juga ingin memfasilitasi wisatawan asing Muslim yang diperkirakan akan membutuhkan makanan halal pada Olimpiade yang diadakan di Tokyo pada tahun 2020, maka pemerintah Jepang selaku tuan rumah mendorong adanya bisnis halal.

Sertifikasi makanan halal ini juga dapat mengembangkan pariwisata Jepang, dengan sertifikasi makanan halal, dapat membuat Jepang mempertahankan atau bahkan terus dapat menarik perhatian para wisatawan Muslim karena saat ini ada persaingan di dunia dalam menarik wisatawan asing Muslim, Jepang mendapat respon positif terhadap kebijakan *halal tourism* dan sertifikasi makanan halal ini, sehingga banyak restoran dan pengusaha di

Jepang yang juga mulai melakukan sertifikasi halal pada produknya.

2. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah area spesifik dari kegiatan diplomatik modern yang muncul karena adanya globalisasi, kegiatan diplomatik ini terkait dengan penggunaan masalah ekonomi sebagai objek dan sarana kerjasama dalam hubungan internasional. Diplomasi ekonomi sama seperti diplomasi pada umumnya, ini merupakan komponen kebijakan luar negeri dan kegiatan internasional suatu negara, diplomasi ekonomi hadir asalnya dari kebijakan luar negeri. Ini adalah mekanisme utama pencapaian yang berhasil dari perdagangan dan hubungan ekonomi berdasarkan tingkat bilateral dan multilateral. Diplomasi ekonomi ini adalah instrumen untuk pengembangan kerja sama yang efektif antara negara dan kawasan di tingkat global (Baranay, 2009).

Berdasarkan definisi diplomasi ekonomi dari G.R Berridge dan Alan James, diplomasi ekonomi adalah suatu usaha menyusun strategi terbaik untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan pertukaran barang, tenaga kerja, jasa, atau sumber daya produksi dalam cakupan internasional. Diplomasi ekonomi dapat dipahami dengan memperluas istilah diplomasi yang bukan saja mengenai hubungan antar negara, tapi juga hubungan langsung dengan bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya antara para aktor politik baik itu formal atau informal (Azizah, 2016).

Setelah Perang Dunia Kedua, kegiatan perdagangan dianggap sebagai tindakan yang disebut diplomasi politik. Namun, jika dilihat asal diplomasi secara umum, perdagangan adalah sebab mendasar untuk melintasi perbatasan nasional pada masa itu dan menjadi sebab perkembangan interaksi antar bangsa.

Contoh-contoh berdasarkan sejarah adalah adanya perdagangan intensif, yang diatur oleh kontrak dagang, melekat dalam peradaban Mesir kuno dan Asia Barat. Perdaganganlah yang pertama kali membuat dibentuknya hubungan dan kesepakatan timbal balik antar pemerintah (Baranay, 2009).

Globalisasi saat ini ditandai dengan ketergantungan ekonomi dari negara satu dengan negara lain, maka dari itu ekonomi mendapat peran sentral dalam hubungan diplomatik dan membuat berkembangnya diplomasi ekonomi. Pelaku diplomasi ekonomi saat ini tidak hanya negara dan organisasi internasional, tetapi juga organisasi ekonomi dan keuangan regional, lembaga khusus, perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah, perorangan, badan hukum dan lain-lain yang jumlahnya terus bertambah.

Tidak hanya alat dan kebijakan yang dirancang, tetapi juga teknik modern yang digunakan dalam diplomasi ekonomi telah banyak berubah. Selain itu, peran negara dalam diplomasi ekonomi ini juga penting untuk melihat tujuan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku diplomasi ekonomi tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan kebijakan ekonomi yang pemerintah miliki dan ingin tuju (Manasserian, 2017).

Diplomasi ekonomi menjadi kerangka pemikiran adalah karena, Jepang memiliki kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan ekonominya melalui bidang pariwisata, sarana yang digunakan dalam diplomasi ekonomi ini adalah kerjasama oleh suatu organisasi sertifikasi halal non-pemerintah dengan organisasi sertifikasi halal di negara lain. Di Jepang ada sebuah organisasi non-pemerintah yang bernama Nippon Asia Halal

Association (NAHA), organisasi sertifikasi makanan halal di Jepang.

NAHA ini telah banyak melakukan kerjasama dengan organisasi sertifikasi halal dari negara lain, seperti MUIS Singapura dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kerjasama ini dilakukan tentu saja dengan tujuan untuk dapat menjadikan NAHA menjadi badan resmi yang dipercaya kehalalan sertifikasinya oleh wisatawan asing Muslim yang datang ke Jepang.

Sehingga hal ini dapat membuat para pelaku bisnis makanan halal agar memilih bekerjasama dengan NAHA dalam proses sertifikasi restoran miliknya. Selain itu, dengan banyaknya NAHA memberi sertifikasi kepada restoran dan produk makanan lokal, diharapkan NAHA dapat memfasilitasi para wisatawan asing Muslim yang datang ke Jepang dan dapat terus menjadi sarana Jepang agar terus dapat menarik wisatawan asing Muslim di seluruh dunia.

Selain itu, sarana Jepang dalam melakukan diplomasi ekonomi adalah dengan cara memberlakukan kebijakan bebas visa bagi beberapa negara di Asia Tenggara. Jepang bekerjasama dengan Malaysia dalam pembebasan visa bagi warga Malaysia pada tahun 2013, sehingga warga negara Malaysia yang memenuhi persyaratan yang relevan (memiliki e-paspor), dapat masuk ke Jepang tanpa memperoleh visa untuk jangka waktu tidak melebihi tiga bulan berturut-turut (tinggal jangka pendek) (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2013).

Selanjutnya adalah kerjasama bebas visa Jepang dengan Indonesia pada tahun 2014, sama halnya dengan Malaysia, warga Indonesia yang

memiliki e-paspor (paspor berlogo chip disampul depan) yang memenuhi standar dari ICAO (International Civil Aviation Organization) dapat mengunjungi Jepang tanpa visa (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2018).

Kerjasama yang dilakukan oleh Nippon Asia Halal Association, organisasi sertifikasi halal dengan organisasi sertifikasi halal di negara lain adalah diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh sesama organisasi di suatu negara. Selanjutnya, kerjasama bebas visa yang berlakukan oleh Jepang kepada Malaysia dan Indonesia ini adalah bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan secara multilateral. Diplomasi ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah Jepang agar dapat terus menarik wisatawan asing Muslim khususnya dari Asia Tenggara, ke Jepang.

Angka wisatawan Muslim yang juga ikut berperan dalam menyumbang devisa Jepang dibidang pariwisata membuat pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan ini, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dan keuntungan bagi ekonomi domestik Jepang. Selain itu, kerjasama ini dilakukan juga karena mengingat adanya persaingan dalam menarik wisatawan asing Muslim di dunia.

Jepang memberlakukan kebijakan bebas visa ini karena memiliki kepentingan ekonomi untuk negaranya, kebijakan ini juga telah memberikan kemudahan bagi wisatawan asing Muslim dari Malaysia dan Indoneisa yang ingin bepergian ke Jepang, sehingga pemerintah Jepang berharap agar angka wisatawan asing Muslim dari Malaysia dan Indonesia terus meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam negeri.

D. Hipotesa

Berdasarkan landasan teoritik di atas, penulis menarik hipotesa sebagai berikut, Jepang menerapkan *Muslim Friendly* tahun 2013-2018:

1. Karena adanya pertimbangan dalam negeri (internal), untuk memenuhi atau tuntutan dari masyarakat dan asosiasi Muslim yang tinggal di Jepang.
2. Karena adanya pertimbangan luar negeri (eksternal), yaitu aspirasi wisatawan asing Muslim, dan karena adanya persaingan dalam menarik wisatawan asing Muslim, Jepang melakukan diplomasi agar mencapai kepentingan ekonomi melalui industri pariwisata.

E. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis berfokus pada data antara tahun 2013-2018 dengan alasan:

1. Pada tahun 2013 pertama kalinya wisatawan Jepang mencapai 10 juta orang, yang di mana 300.000 dari 10 juta itu adalah wisatawan Muslim.
2. *Halal tourism* di Jepang semakin berkembang pada tahun 2018 dengan dibuktikan semakin banyaknya restoran halal, hotel syari'ah, toilet dengan air mengalir dan tempat ibadah yang terjangkau.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tujuan dan kepentingan Jepang dalam mengembangkan konsep *halal tourism* dibidang pariwisatanya.
2. Menambah dan memperkaya Kajian Hubungan Internasional tentang

diplomasi, politik luar negeri Jepang, dan masalah dunia Islam.

G. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian terkait “Strategi Jepang Menggunakan *Muslim Friendly* Untuk Menarik Wisatawan Muslim (2013-2018)”, penulis menggunakan metode studi pustaka.

Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi melalui berbagai dokumen, buku, majalah, jurnal dan serta dari website resmi. Studi kepustakaan juga dapat merupakan referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki jenis yang sama mengenai masalah yang akan dibahas (Mirzaqon T. & Purwoko).

Penulis juga memperoleh data melalui data sekunder, sumber data dari data sekunder ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan hubungan internasional, metodologi penelitian, serta materi-materi yang dapat mendukung tulisan ini. Sumber-sumber tadi didapatkan dengan cara literatur yang juga termasuk pencarian data melalui internet (Jatmika, 2016).

Tujuan akhir sains dari ditulisnya tulisan ini adalah eksplanasi, yang dimana eksplanasi adalah mencoba atau berusaha menjawab jenis pertanyaan yang menanyakan “mengapa”. Seperti yang telah penulis tulis diatas, bahwa rumusan masalah yang penulis gunakan adalah “mengapa” sehingga menjadikan tujuan akhir sains penelitian ini adalah eksplanasi (Mas'ood, 1990).

H. Sistematika Penulisan

BAB I Yang berisi latar belakang masalah, yang di mana latar belakang masalah ini memaparkan bagaimana permasalahan itu terjadi, lalu rumusan masalah, selanjutnya ada kerangka pikiran/teori, yang di mana penulis menghubungkan permasalahan yang ada menggunakan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut, setelah penulis menganalisa menggunakan teori maka akan muncul

dugaan sementara atau yang biasa disebut hipotesa, kemudian jangkauan penelitian yang di mana jangkauan ini menjadi *highlight* kejadian pada tahun tertentu, selanjutnya ada tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Yang berisi tentang bagaimana dinamika industri pariwisata Jepang dan munculnya para pesaing industri pariwisata Jepang sehingga membuat Jepang harus berinovasi dalam bidang pariwisata.

BAB III berisi tentang bagaimana sejarah masuknya Islam ke Jepang, bagaimana perkembangan Islam di Jepang, dan bagaimana keadaan masyarakat muslim yang tinggal di sana, proses bagaimana pelabelan makanan halal dan penjelasan apa saja strategi Jepang dalam menerapkan pariwisata halal di Jepang.

BAB IV berisi tentang jawaban dari hipotesa atau yang dapat disebut juga dengan praduga atau dugaan sementara. Yang di mana menjawab hipotesa pertama yaitu, karena adanya pertimbangan dalam negeri, untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat dan asosiasi Muslim yang tinggal di Jepang (internal). Yang kedua adalah, karena adanya pertimbangan luar negeri (eksternal), yaitu aspirasi wisatawan asing Muslim dan karena adanya persaingan dalam menarik wisatawan asing Muslim sehingga membuat Jepang melakukan diplomasi demi mencapai kepentingan ekonomi melalui industri pariwisata.

BAB V Adalah bab atau bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis mulai dari bab I hingga bab V.